



tribunjogja.com

Masalah Sampah Belum Terpecah

■ Warga Nekat Buang Limbah di Jalanan

Setelah sidak lapangan, kami menangkap beberapa kendala yang jika tidak diantisipasi dari awal akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

YOGYA. TRIBUN - Proses pembuangan sampah di sejumlah depo di Kota Yogyakarta menemui sejumlah persoalan. Diketahui, banyak warga yang nekat membuang sampah di depo Mandala Krida di luar jam operasional yang telah ditentukan.

Selain menimbulkan tumpukan baru, hal ini berakibat pada kondisi depo yang tidak terjaga kebersihannya dan menghambat kelancaran operasional. Perlu diketahui, depo Mandala Krida memiliki jam operasional yang telah diatur, yaitu buka selama dua hari dan tutup 1 hari.

Tegakkan Hukum Bagi Pelanggar

PEMDA DIY menegaskan akan memberikan sanksi tegas bagi para pelanggar pembuangan sampah ilegal. Sanksi ini tidak hanya berupa sanksi administratif, tetapi juga penegakan hukum.

"Kami memiliki sanksi administratif dan sanksi penegakan hukum. Izin penggunaan lahan untuk pembuangan sampah harus ada," jelas Sekda DIY, Bery Suharsono, kemarin.

Sebelum menerapkan sanksi, Pemda DIY akan terlebih dahulu mengecek.

PERSOALAN BARU

- Proses pembuangan sampah di sejumlah depo di Kota Yogyakarta menimbulkan persoalan.
- Banyak warga yang nekat membuang sampah di depo Mandala Krida di luar jam operasional.
- Legislatif menilai pelaksanaan desentralisasi di Kota Yogyakarta terkendala belum adanya TPS3R yang baru dilaksanakan pertengahan Mei 2024.
- DLHK DIY mengakui masih ada tumpukan sampah di beberapa titik jalan.
- DLHK DIY membantah persoalan bukan dari sistem desentralisasi sampah, namun teknis pengambilan sampah.
- Pemda DIY akan menerapkan sanksi bagi pembuang sampah liar.

BERSERAKAN - Sampah berserakan di area dekat Kebun Binatang Gembira Loka. Banyak warga nekat membuang sampah di pinggir jalan.

ke halaman 11

ke halaman 11

GRAFIS/FAUZIA RAKITMAN

Masalah Sampah

● Sambungan Hal 1

Adapun, jam pembuangan sampah pun dibatasi, seperti di Depo Mandala Krida yang buka dari pukul 06.00 WIB hingga 07.00 WIB.

Pengawas Lapangan Depo Mandala, Mayar, mengatakan, petugas kerap kali harus menegur warga yang membuang sampah di luar jam yang ditentukan. "Yang nekat juga ada. Dikasih tahu gak mau, bilangnyanya udah satu bulan (tidak diambil sampahnya). Sampah ke mana kok cuma sekian. Gak bisa jawab," ungkap Pengawas Lapangan Depo Mandala, Mayar, Jumat (10/5).

Dia menambahkan, saat ini, jumlah orang yang membuang sampah secara mandiri, atau sampah dari rumah tangga meningkat signifikan. Jika dulu tercatat ada 850 orang yang membuang di Depo Mandala Krida, saat ini ada sekitar 1.000 orang.

"Sekarang mandiri itu tidak tercover, saking banyaknya yang rumah tangga langsung buang lokasi. Dikarenakan sama penggero-bak dinaikan tarifnya, gak mau. Dulu belum separah ini. Secara aturan boleh (buang langsung), tapi jadi gak terkelola baik," ujar Mayar.

Dari pantauan Tribun Jogja, sejumlah petugas pun harus merapikan sampah-sampah yang masuk untuk nantinya dibawa ke TPST Nitikan. Meski begitu, disebut Mayar TPST Nitikan belum bisa mengelola seluruh sampah di Kota Jogja.

"Dibawa ke Nitikan, di-proses ke sana tapi kan gak semuanya, di sana cover 1

kota. Sehari 20 - 30 ton, gak bisa cover semua," ulasnya.

Belum siap

Sebagai informasi, problem persampahan di Kota Yogya semakin memuncak seiring penutupan total TPA Piyungan sejak 1 Mei 2024 silam. Kalangan legislatif menilai Pemkot Yogya belum siap menerapkan program desentralisasi dari Pemda DIY.

Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Yogya, Nurcahyo Nugroho, menyampaikan, dorongan desentralisasi sampah sudah disampaikan Pemda DIY satu tahun silam, agar Pemkot Yogya bersiap. Namun, berdasarkan hasil pantauannya sejauh ini, deretan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) yang dibangun Pemkot Yogya belum sepenuhnya siap.

"Setelah sidak lapangan, kami menangkap beberapa kendala yang jika tidak diantisipasi dari awal akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Salah satunya, belum siapnya tiga TPS sampai pertengahan Mei 2024, bahkan kemungkinan ada yang beroperasi akhir Mei 2024," urai Nurcahyo.

Bahkan, menariknya, permasalahan tersebut mencuat hanya beberapa saat menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Yogya pada November mendatang. Menurutnya, antara Juni-September 2024 merupakan bulan-bulan politik.

Sehingga, siapapun Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang berkontestasi, harus menyajikan program konkret penanggulangan sampah. "Harus menjadi program utama, sehingga sungguh-sungguh melayani warga Kota Yogya, bahkan berani menjamin target (pe-

nyelesaian) 1 tahun setelah terpilih," tegasnya.

Komitmen

Menurutnya, kesungguhan dari para calon tersebut harus dituangkan dalam sebuah kontrak politik di hadapan warga masyarakat. Sehingga, ketika target-target yang tertuang di dalam kontrak politik gagal direalisasikan, para calon pun harus mendapatkan konsekuensi.

"Harus berani melakukan kontrak politik dengan warga, khususnya yang tinggal di Kota Yogyakarta. Jika tidak berhasil, ya, minta maaf pada warga," jelasnya.

Komitmen tersebut menjadi penting, karena sejatinya Wali Kota Yogyakarta sudah ditunjang dengan sarana dan prasarana yang sangat memadai. Mulai dari Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas, anggaran, kebijakan, perangkat sampai kelurahan, peralatan, koordinasi lintas sektor dan lain-lain. "Tapi, yang paling utama, apakah punya keberanian, kesungguhan dan komitmen," ungkap Anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta itu.

Persoalan teknis

Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta (DLHK DIY) mengakui masih ada tumpukan sampah di beberapa titik jalan, meskipun desentralisasi pengelolaan sampah telah diberlakukan.

Namun, Kepala DLHK DIY Kusno Wibowomenegaskan bahwa masalah tersebut hanya terkait dengan teknis pengambilan sampah, bukan sistem desentralisasi sendiri. "Kalau sampah yang ada di jalan-jalan, ya

memang tidak bisa dipungkir masih ada terlihat," ujar Kepala DLHK DIY, Kusno Wibowo, Jumat (10/5).

Kusno menjelaskan bahwa tumpukan sampah di jalanan memang masih terlihat, namun hal tersebut bukan fenomena baru dan tidak hanya terjadi setelah desentralisasi. Ia mencontohkan beberapa titik jalan di dekat Gembiraloka yang memang rawan tumpukan sampah.

Meskipun demikian, Kusno meyakini bahwa desentralisasi sampah secara umum berjalan dengan baik. Kabupaten/kota di DIY dinilai mampu mengelola sampahnya secara mandiri. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya sampah yang menbludak di Depo Kota Yogya, serta tidak adanya keluhan resmi dari kabupaten/kota terkait permasalahan sampah di lapangan.

Kusno juga menjelaskan bahwa kabupaten/kota telah mengoptimalkan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPST) yang ada, dan membangun TPST baru. Contohnya, di Sleman dengan TPST Tamanmartani dan Minggir, dan di Kota Yogyakarta dengan TPST Nitikan yang sudah beroperasi, serta TPST Kranon dan Karangmiri yang sedang disiapkan.

Kusno optimis bahwa dengan optimalisasi TPST dan koordinasi yang baik antar instansi, permasalahan tumpukan sampah di jalanan dapat segera diatasi. Kusno kembali menekankan bahwa fokus utama saat ini adalah pada kelancaran teknis pengambilan sampah, bukan pada sistem desentralisasi yang secara keseluruhan dinilai berjalan dengan baik. (han/aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005